

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan publikasi ini merupakan salah satu perwujudan dari amanah Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi tentang daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung, pengukuran dilakukan dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 4 komponen yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, semoga publikasi **Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)** ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Temanggung, 15 Oktober 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**SADWOKO HERI SUSATYO, S.E., M.Si**

NIP: 196010091989031007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II    METODOLOGI.....	6
2.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	6
2.2 Metodologi Penghitungan IPM.....	8
BAB III  ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG.....	15
3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung.....	15
3.2. Status Pembangunan Manusia dan Kecepatan IPM.....	18
3.3. Angka Harapan Hidup.....	23
3.4. Harapan Lama Sekolah.....	25
3.5. Rata – Rata Lama Sekolah.....	27
3.6. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.....	29
3.7. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi.....	32
3.8. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Kemiskinan.....	37
BAB IV  GENDER        PEMBANGUNAN        MANUSIA        KABUPATEN TEMANGGUNG.....	42
4.1. Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki.....	45
4.2. Capaian Pendidikan Antar Gender Sudah Cukup Baik.....	46
4.3. Kesetaraan Ekonomi Antar Gender.....	48
BAB IV  KESIMPULAN.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Korelasi <i>Rank Spearman</i> IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	36
Tabel 3.2	Korelasi <i>Rank Spearman</i> IPM dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2015 - 2019.....	16
Gambar 3.2	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	17
Gambar 3.3	Peta Tematik IPM Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kedu, 2019 .....	18
Gambar 3.4	Peta Tematik Kabupaten/Kota Menurut Klasifikasi Capaian IPM, 2019.....	21
Gambar 3.5.	Pertumbuhan IPM Tahun 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	22
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	23
Gambar 3.7	Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kedu, 2019 .....	24
Gambar 3.8	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	26
Gambar 3.9	Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kedu, 2019 .....	27
Gambar 3.10	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019.....	28
Gambar 3.11	Peta Tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karisidenan Kedu, 2019.....	29
Gambar 3.12	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 (000).....	30
Gambar 3.13	Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kedu, 2019.....	31
Gambar 3.14.	Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010) Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2019.....	33
Gambar 3.15.	Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (ADHK 2010) di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	34

Gambar 3.16.	Perkembangan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019.....	38
Gambar 3.17.	Tipologi Daerah Menurut IPM dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2019 .....	39
Gambar 4.1.	Perkembangan IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, IPM dan IPG Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019 .....	44
Gambar 4.2.	Perkembangan Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019 .....	45
Gambar 4.3.	Perkembangan Rata-Rata Lama sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019 .....	47
Gambar 4.4.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019 .....	48
Gambar 4.5.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019 .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejarah pembangunan ekonomi dunia secara global dapat dibedakan antara Sebelum tahun 1990 dan setelah tahun 1990. Sebelum tahun 1990, dunia seolah melupakan arti pentingnya manusia dalam diskusi-diskusi tentang pembangunan ekonomi. Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Pada saat itu, diskusi tentang pembangunan manusia hanya sebatas tentang modal manusia. Artinya, manusia hanya dipandang sebagai *input* dan juga alat dalam pembangunan. Indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan adalah pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangnya kedua indikator tersebut dinilai belum menjelaskan apakah tujuan pembangunan tercapai. Besarnya pendapatan nasional belum bisa mengungkapkan komposisi penduduk atau penerima manfaat nyata. Selain itu, kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut. Aspek penting tersebut diantaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Menjelang Tahun 1990, beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun disertai dengan tingginya pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan dan masalah sosial manusia lainnya. Menanggapi isu tersebut, pada tahun 1990 untuk pertama kalinya UNDP mempublikasikan Laporan Pembangunan Manusia.

Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia melihat secara komprehensif semua aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, serta gender. Pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang

menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Hal ini terkait konsep pembangunan manusia UNDP yang mengandung empat unsur yaitu: produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu "model" pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk:

- a. Tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya;
- b. Untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; dan
- c. Oleh penduduk, berupa upaya pemberdayaan (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990).

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; sementara dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya



beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan publikasi “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2019” secara umum adalah untuk melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung hingga tahun 2019. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan masing-masing komponen IPM selama tahun 2015 – 2019.
2. Mengetahui posisi relatif capaian IPM Kabupaten Temanggung terhadap capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kedu.
3. Mengetahui bagaimana hubungan antara IPM, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.
4. Mengetahui ketimpangan gender dalam pembangunan manusia Kabupaten Temanggung.

## **1.3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari :

1. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun.
2. Data publikasi BPS yang berasal dari hasil survei-survei lainnya.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Menyajikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang, tujuan sumber data, serta sistematika penulisan
- Bab II Menyajikan tentang metodologi meliputi konsep tentang pembangunan manusia dan perkembangan metode penghitungan IPM.
- Bab III Menyajikan analisis dan pembahasan yang meliputi perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam beberapa dimensi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung serta hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan.
- Bab IV Menyajikan data dan analisis Indeks Pembangunan Gender dan komponen Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung
- Bab V Menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Konsep Pembangunan Manusia**

Cikal bakal konsep pembangunan manusia yang digunakan oleh UNDP adalah konsep pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Sen dan Haq. Amastya Sen (1989) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Artinya pembangunan harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberi kesempatan kepada manusia untuk menggunakan kemampuannya. Mahbub ul Haq (1995) berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu ada kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Oleh karenanya, UNDP merumuskan ide dasar pembangunan manusia yaitu :

- **Manusia**

Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.

- **Kesempatan**

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal.

- **Pilihan**

Pembangunan manusia pada dasarnya membahas tentang lebih banyak pilihan. Pembangunan manusia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pilihannya, bukan memaksa mereka memanfaatkannya. Tidak ada yang dapat menjamin kebahagiaan manusia dan pilihan yang dibuat setiap orang adalah tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Pembangunan manusia juga harus memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang produktif dan kreatif.

Sebagai salah satu upaya untuk menganalisis status pembangunan baik antar negara maupun antar daerah, maka UNDP menyusun *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan dalam publikasi berjudul *Human Development Reports*.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

## 2.2. Metodologi Penghitungan IPM

### Sumber data :

- a. Angka harapan hidup saat lahir, bersumber dari Sensus Penduduk 2010 - SP2010, Proyeksi Penduduk).
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

### Konsep dan Definisi

#### Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy – e<sup>0</sup>*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

**Rata-Rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)**

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

**Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)**

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

## Teknis Penghitungan

### Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

### Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)*

$$\text{Formula HLS} = \text{EYS}_{\alpha}^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

$\text{HLS} = \text{EYS}_{\alpha}^t$  Harapan Lama Sekolah pada umur  $\alpha$  di tahun  $t$

$E_i^t$  jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

$P_i^t$  Jumlah penduduk usia  $i$  pada tahun  $t$

$i$  Usia ( $a, a+1, \dots, n$ )

### Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years Schooling (MYS)*

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (tahun)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	18

Cara menghitung rata – rata lama sekolah

- menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.
- mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki.

- mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.  
mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.
- menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.

<b>Keterangan</b>	<b>Lama Sekolah</b>
Tidak Pernah Sekolah	0
Masih sekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak sekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

### **Pengeluaran per kapita per bulan**

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
- b. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100

$$\bar{X}_t = \frac{\bar{X}_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Dimana :

$\bar{X}_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$\bar{X}_t$  = Rata – rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$  = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012



Menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP)

- menghitung *value* (rupiah yang dikeluarkan) dan *quantity* (jumlah barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas MODUL Konsumsi, terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.
- menghitung *quantity* komoditi perumahan dari data Susenas KOR.
- menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari IHK.
- menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.
- menghitung PPP:

$$PPP = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana

$p_{ij}$  = harga komoditas i di Jakarta Selatan

$p_{ik}$  = harga komoditas i di kab/kota j

$m$  = jumlah komoditas

## c. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

## Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

## Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

## Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yaitu ;

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan		100 (PPP US)	1007436* (Rp)	1007721	26572352** (Rp)

**Keterangan:**

- \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

### **BAB III**

## **ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG**

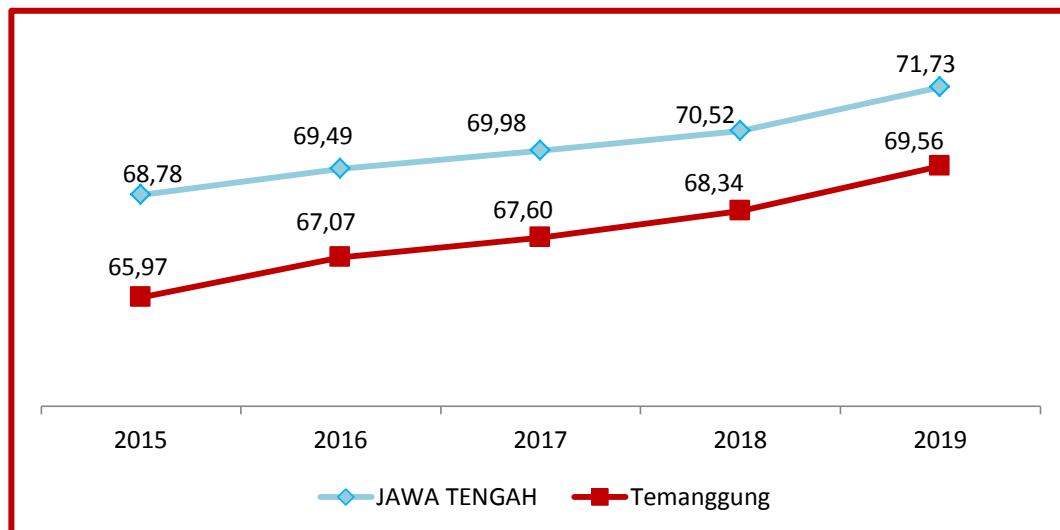
### **3.1. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung**

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km) sehingga menjadi jalur strategis untuk melintasi antar kabupaten. Disisi lain secara potensi ekonomi, Kabupaten Temanggung memiliki sumber daya alam yang cukup potensi diantaranya tembakau, kopi, bawang dll. Dengan posisi yang strategis dan kekayaan alam tersebut, Temanggung memiliki potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang maju sesuai visi panjang Kabupaten Temanggung. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Temanggung dalam menjawab tantangan tersebut. Bila pertumbuhan serta perkembangan kualitasnya lambat atau cenderung di bawah kabupaten lain, niscaya kita akan tersisih dan pada akhirnya penduduk Temanggung hanya akan menjadi penonton roda pembangunan yang berputar di sekelilingnya.

Oleh karena itu sudah seharusnya Kabupaten Temanggung menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan kualitas SDM dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia.

Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

**Gambar 3.1.**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan**  
**Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

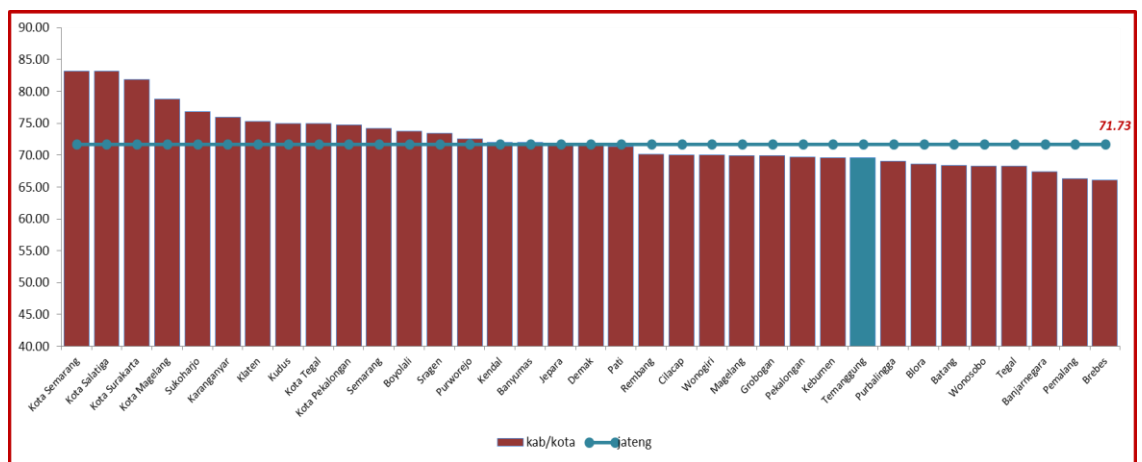


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang lima tahun terakhir, Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan pembangunan sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang semakin meningkat. Pada Tahun 2015, IPM Kabupaten Temanggung adalah sebesar 65,97 kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 69,56 pada Tahun 2019. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa Tengah, maka pada Tahun 2019,

IPM Kabupaten Temanggung masih tetap berada pada peringkat ke – 27 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hingga Tahun 2019, secara umum capaian pembangunan Kabupaten Temanggung masih dibawah capaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang terlihat dari IPM Kabupaten Temanggung yang masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah.

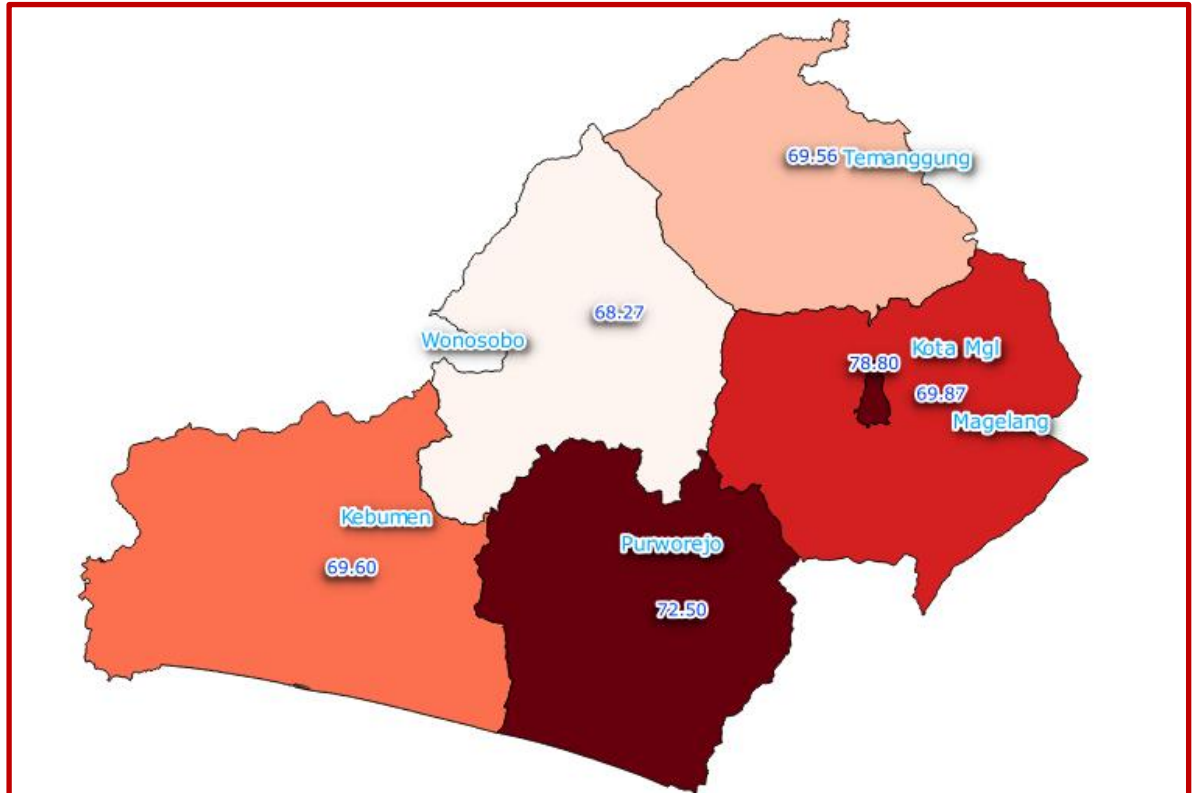
**Gambar 3.2**  
**IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang Tahun 2015 – 2019, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan berada pada peringkat ke 26 diantara 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

**Gambar 3.3**  
**Peta Tematik IPM Menurut Kabupaten/Kota**  
**se Eks Karesidenan Kedu, 2019**



Jika dibandingkan dalam regional eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Temanggung juga terlihat cukup tertinggal, yaitu hanya pada peringkat 5 pada Tahun 2019, lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Artinya dalam regional Karesidenan Kedu, pembangunan di Kabupaten Temanggung juga tertinggal dibanding dengan kabupaten/kota lain dalam regional tersebut.

### **3.2. Status Pembangunan Manusia dan Kecepatan IPM**

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah - wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama

dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$
- Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- Rendah :  $IPM < 60$

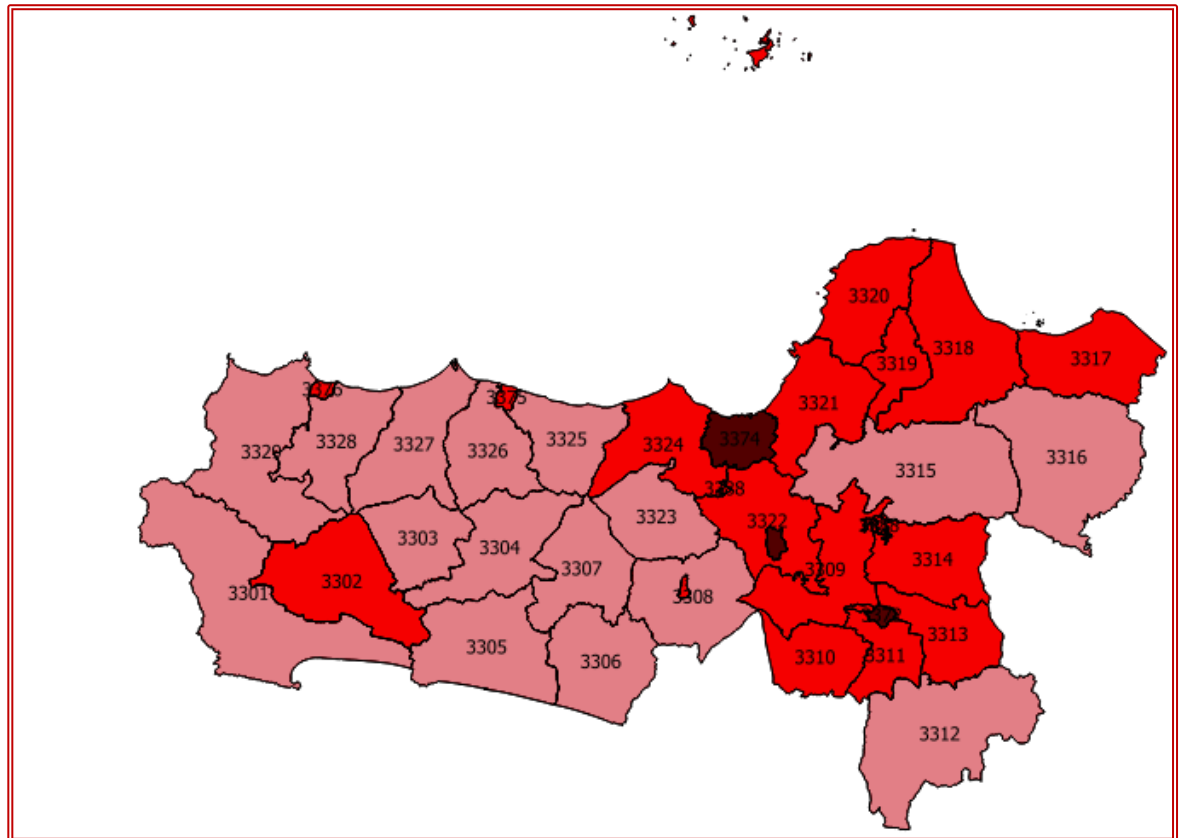
Hanya ada 3 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai status pembangunan sangat tinggi yaitu Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sedangkan kabupaten/kota yang mencapai status pembangunan tinggi meliputi 17 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Enam belas kabupaten/kota lainnya, termasuk Kabupaten Temanggung baru mencapai status pembangunan manusia kategori sedang, dan tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki status pembangunan rendah.

Selain angka capaian pembangunan manusia yang terus tumbuh, perkembangan pembangunan manusia juga bisa dilihat dari perkembangan status pembangunan manusianya. Selama hampir satu dekade, 2010 – 2019, Kabupaten Temanggung masih tetap berada dalam kategori pembangunan sedang, hampir mencapai status pembangunan tinggi. Di provinsi Jawa Tengah, terdapat 18 Kabupaten/kota yang sudah mengalami perubahan status pembangunan dalam 9



tahun tersebut, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes berhasil meningkat dari status pembangunan rendah menjadi status pembangunan sedang. Terdapat 13 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan status pembangunan sedang menjadi tinggi yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, kabupaten pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sedangkan Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang merupakan kota yang berhasil menaikkan status pembangunan dari tinggi menjadi sangat tinggi.

**Gambar 3.4.**  
**Peta Tematik Kabupaten/Kota Menurut**  
**Klasifikasi Capaian IPM, 2019**



Keterangan :

- : Sangat tinggi
- : Tinggi
- : sedang

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

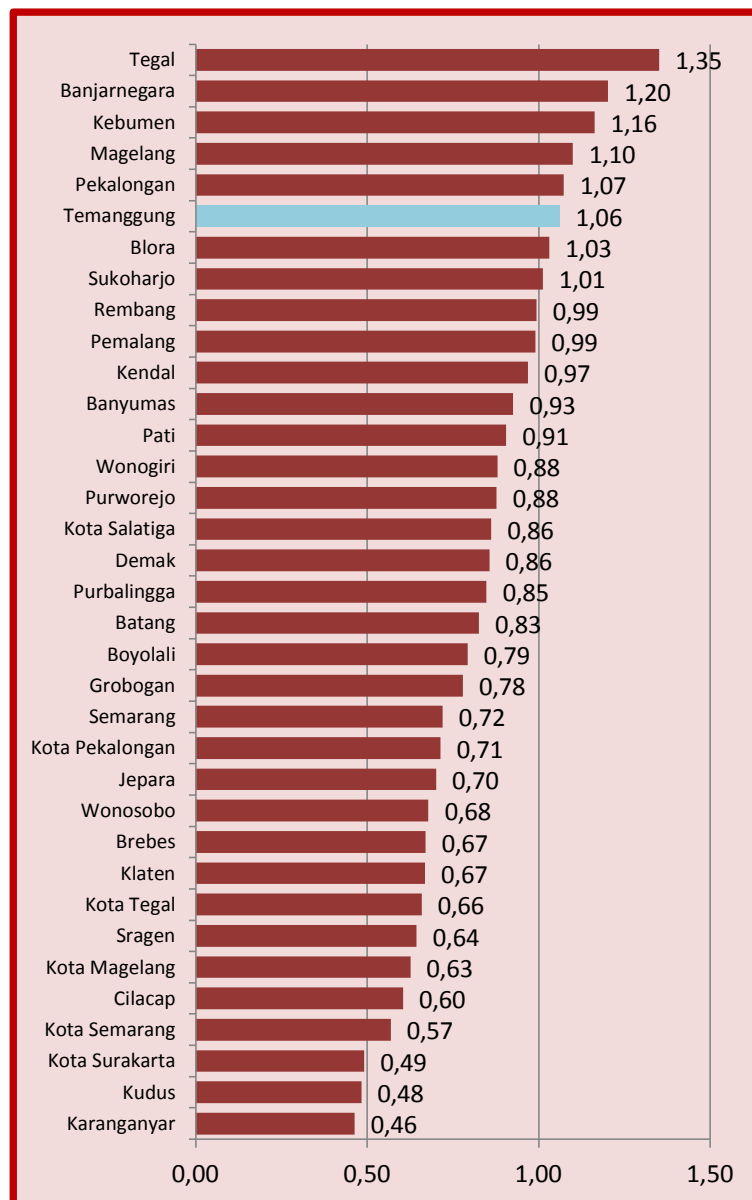
$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

*Keterangan:*

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $t$

$IPM_{t-1}$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $(t-1)$

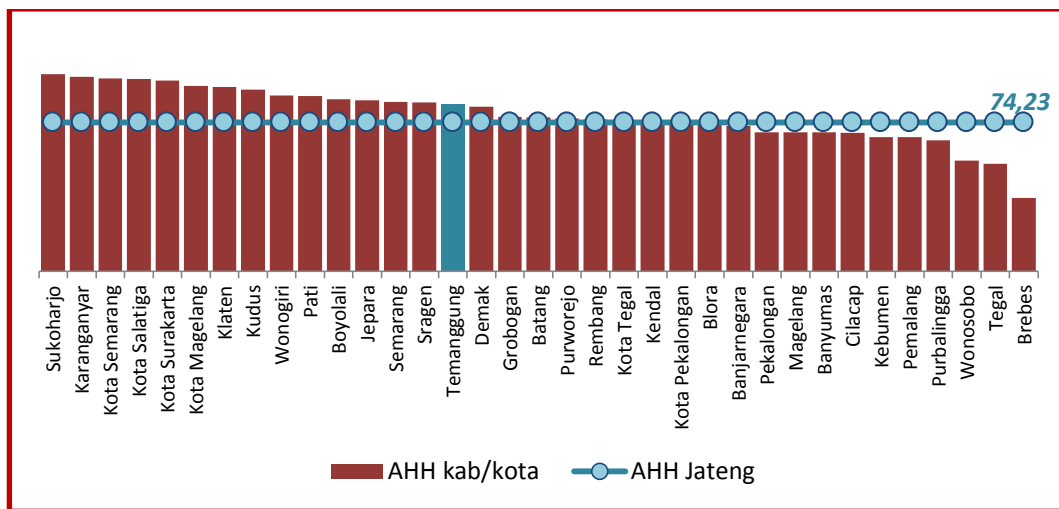
**Gambar 3.5.**  
**Pertumbuhan IPM Tahun 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**



Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,06 persen. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung berada dalam posisi tercepat ke 6.

### 3.3. Angka Harapan Hidup

**Gambar 3.6.**  
**Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah, 2019**

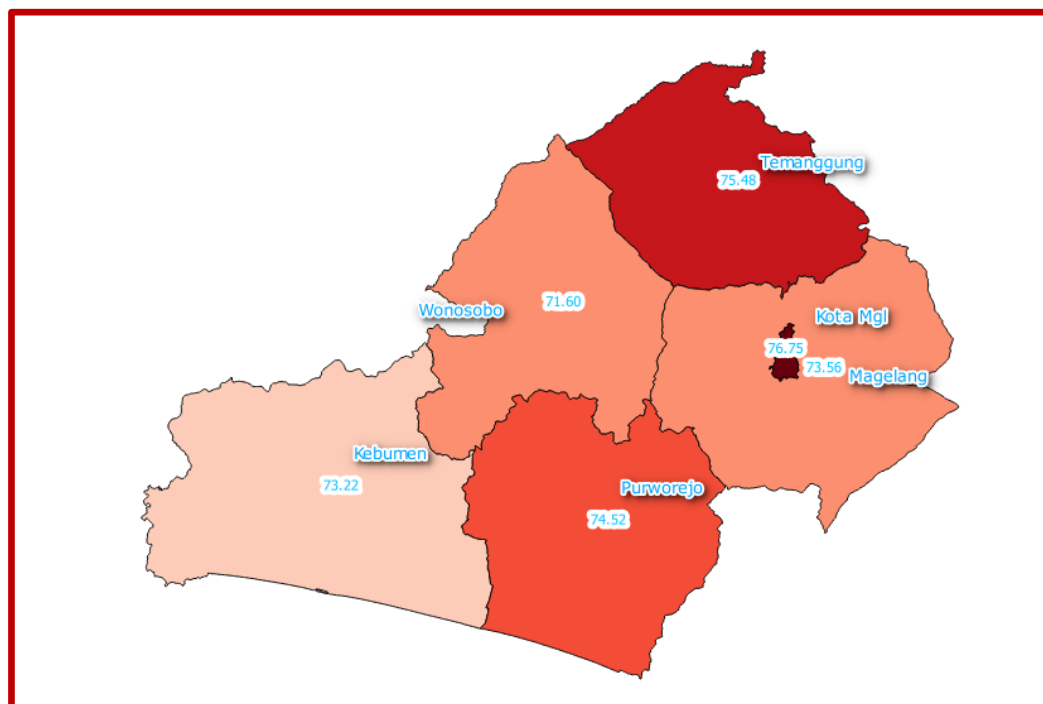


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Derajat kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang tinggi setidaknya menunjukkan fenomena lebih terjaminnya aspek kesehatan, lingkungan yang sehat, sosial kemasyarakatan yang aman terjamin dan faktor-faktor pendukung alami lainnya. Selain itu angka harapan hidup yang tinggi juga dipengaruhi oleh peran genetika, gizi, makanan, pola hidup, rendahnya paparan pencemaran serta kematangan psikologis sehingga seseorang secara alami menjadi lebih kuat/siap menghadapi tekanan hidup/stress.

Berdasarkan indikator angka harapan hidup, maka capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 15 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Angka harapan hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 mencapai 75,48 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah yang baru mencapai 74,23 tahun.

**Gambar 3.7.**  
**Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, setelah angka harapan hidup Kota Magelang yang mencapai 76,75 tahun. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan

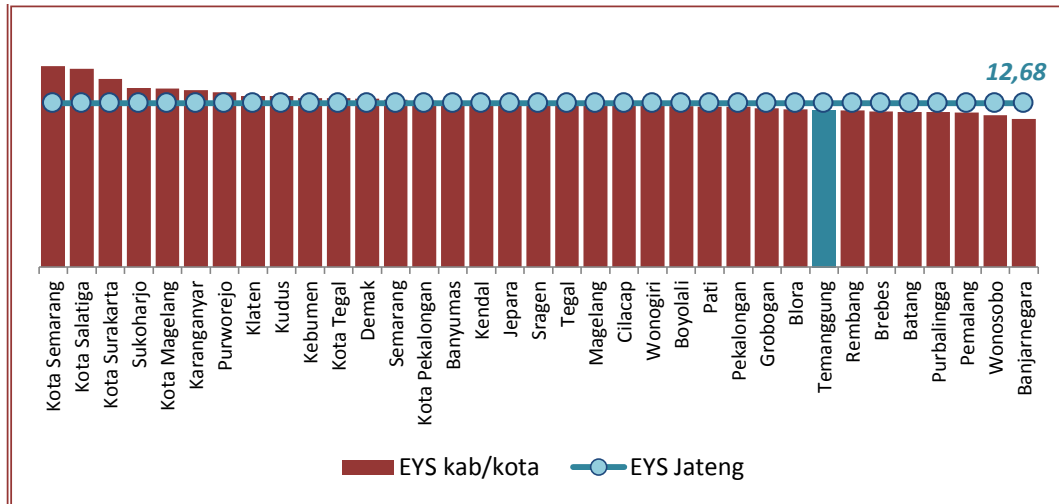
menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

### **3.4. Harapan Lama Sekolah**

Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi “*Knowledge Based Society*”. Pengertian “*Knowledge Based Society*” muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. *Knowledge* yang menyatu (*embodied*) dengan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga *knowledge* merupakan bagian langsung yang mempengaruhi faktor produksi.

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*).

**Gambar 3.8.**  
**Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah, 2019**

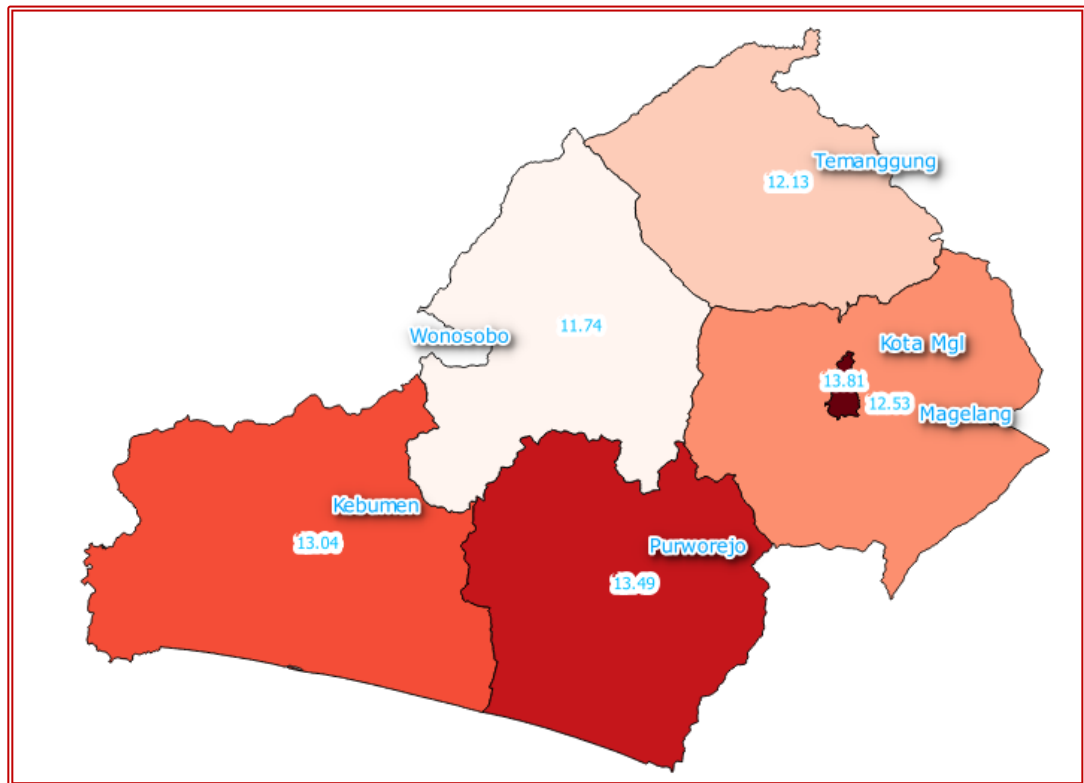


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 berada pada peringkat ke 28 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,13 tahun dan dibawah harapan sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 12,68 tahun.

Status pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan indikator harapan lama sekolah masih sangat tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung menempati peringkat ke-5, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo.

**Gambar 3.9.**  
**Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

### 3.5. Rata – Rata Lama Sekolah

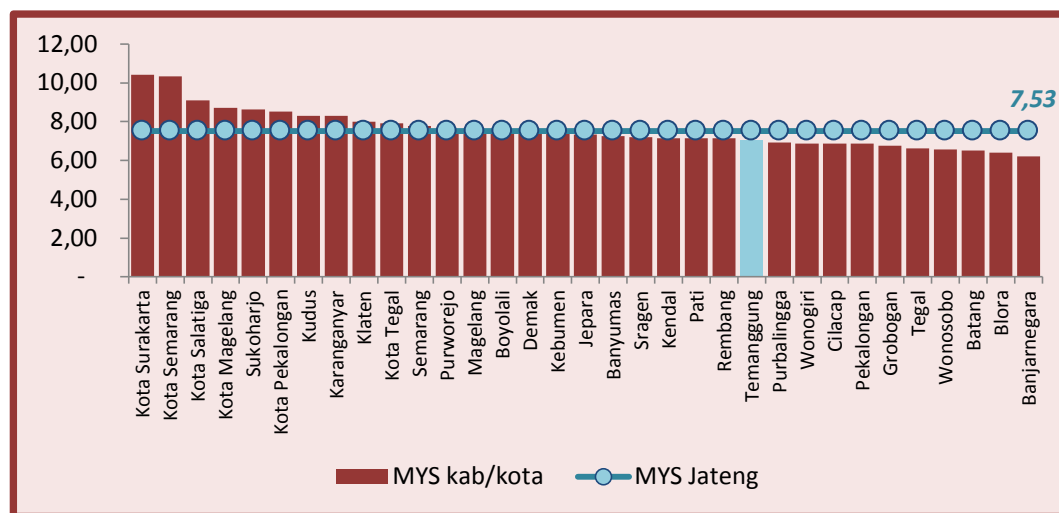
Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang seharusnya bisa meningkatkan produktivitas dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara pribadi, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000)



mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

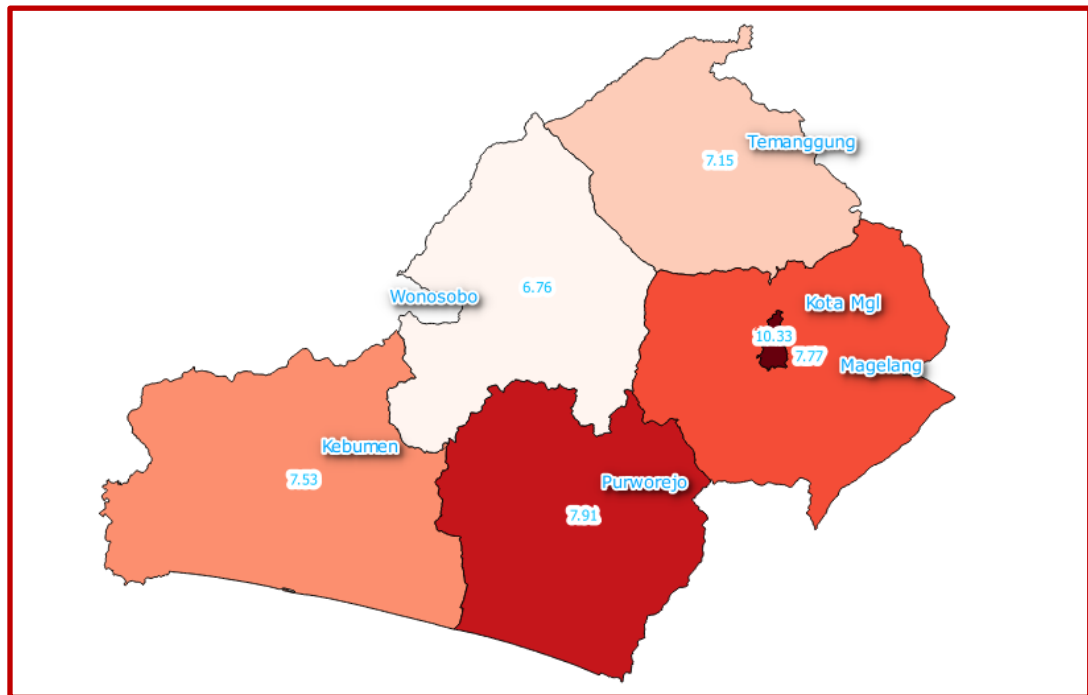
**Gambar 3.10.**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 baru mencapai 7,15 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 7,53 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah kelas 6 SD atau kelas 1 SLTP. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-22 diantara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 3.11.**  
**Peta tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

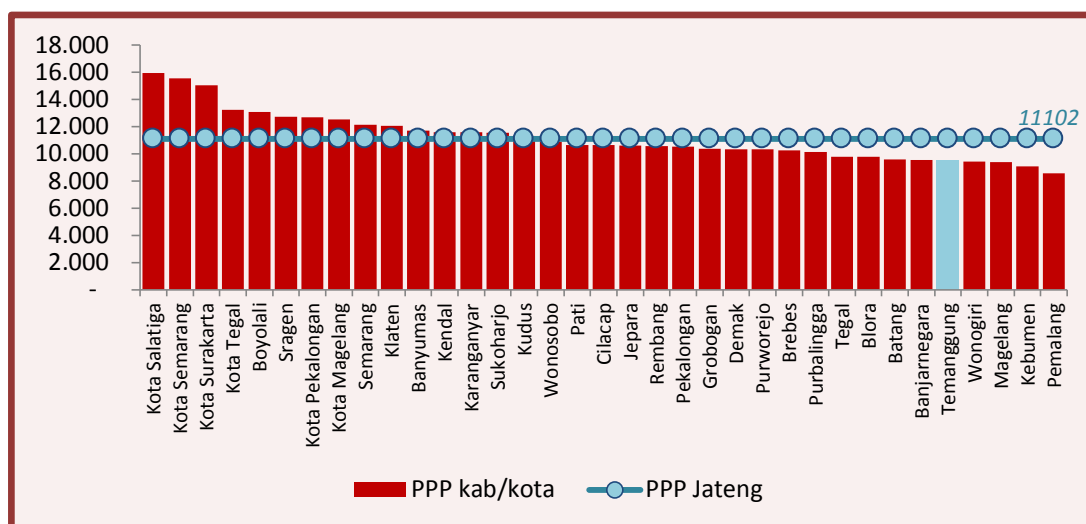
Dengan menggunakan indikator ini, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih sangat tertinggal di banding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke 5, sedikit di atas Kabupaten Wonosobo. Jika penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 1 SLTP, rata-rata penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SLTA.

### **3.6. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan untuk keperluan perbandingan antar

negara. Sebagai catatan, setidaknya terdapat dua kelemahan penggunaan PDB riil perkapita sebagai ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk Indonesia, karena data PDB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS sebagai proksi pendapatan.

**Gambar 3.12.**  
**Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019 (000)**

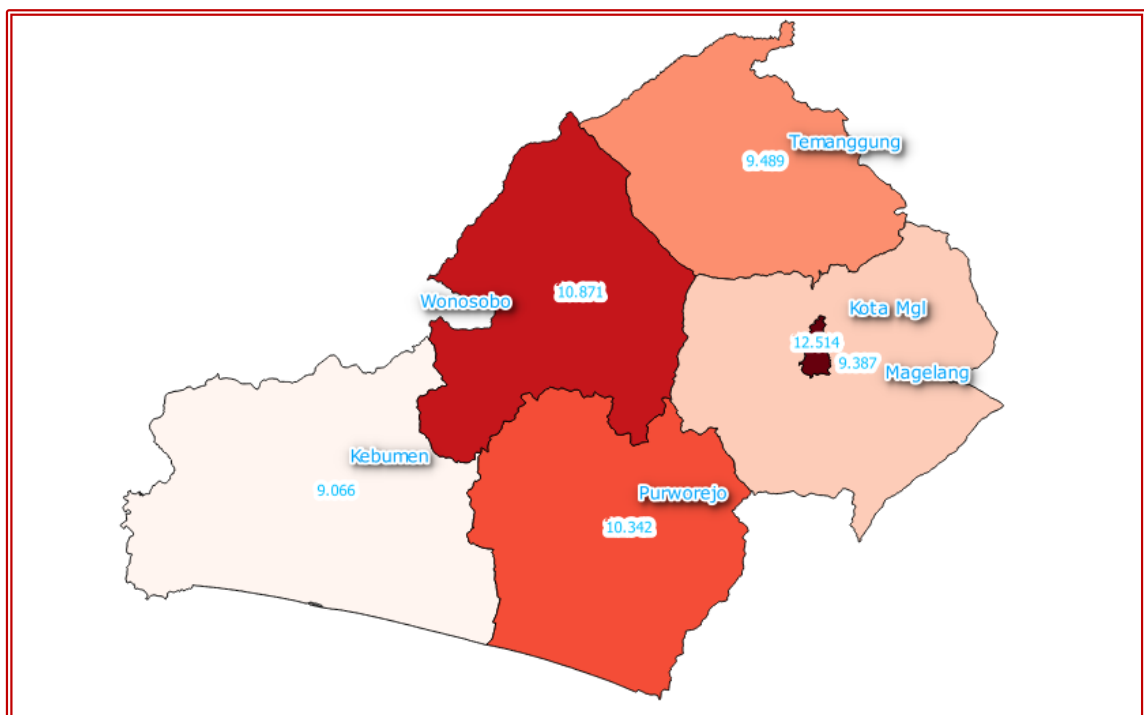


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 31 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada

umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 9.489.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 11.102.000,00.

**Gambar 3.13.**  
**Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

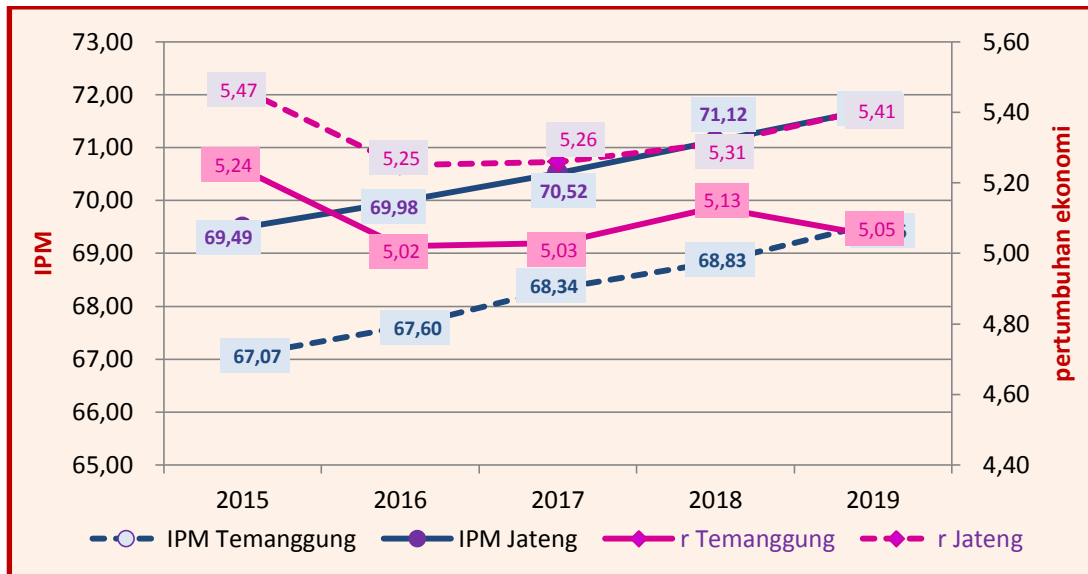
### 3.7 Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan yang otomatis, namun apabila keduanya disatukan dalam kebijakan yang searah, akan tercipta kekuatan yang saling mendukung sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Paradigma pembangunan konvensional menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai capaian dari pembangunan. Memang pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi bukan merupakan akhir pembangunan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan pada gilirannya rakyat menggunakan kapabilitasnya (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, paradigma pembangunan saat ini meletakkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2015 - 2019 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang tajam. Sepanjang 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung konsisten tumbuh diatas 4 persen dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Secara umum juga dapat dilihat bahwa sepanjang 2015 – 2019, IPM Kabupaten Temanggung selalu berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah, demikian juga pertumbuhan ekonomi Temanggung masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

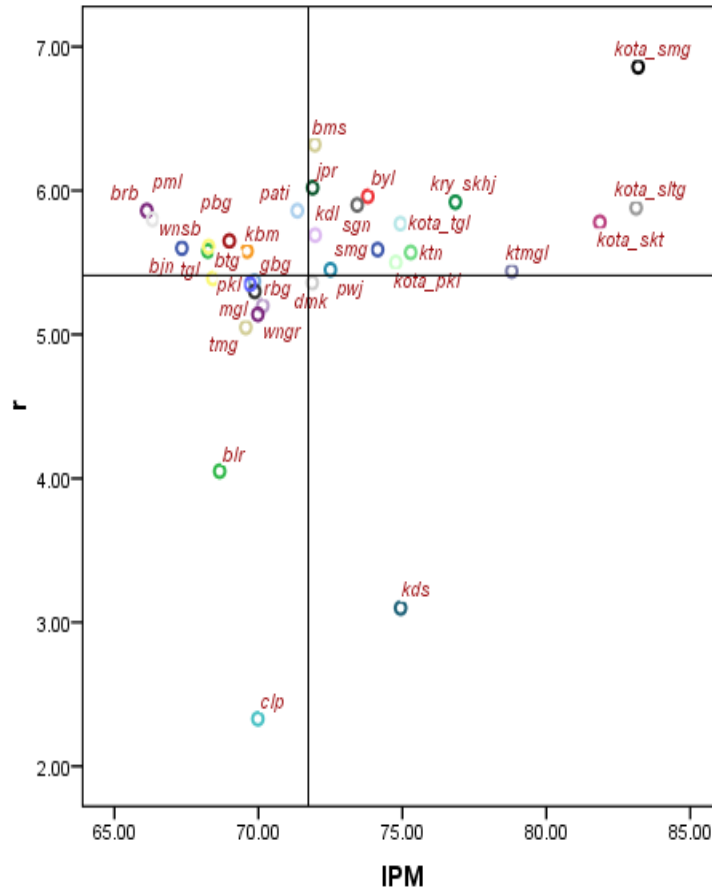
**Gambar 3.14.**  
**Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010)**  
**Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk melihat karakteristik IPM Kabupaten Temanggung khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, maka diperlukan analisis tipologi dengan mengadopsi klasifikasi *Klassen*, yaitu menggunakan indikator IPM dan pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis ini karakteristik IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, sementara pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Disebut tinggi apabila indikator kabupaten/kota lebih tinggi dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah dan digolongkan rendah apabila lebih rendah dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 3.15.**  
**Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**(ADHK 2010) di Provinsi Jawa Tengah, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan kuadran diatas, terlihat bahwa tipologi daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah sebagai berikut :

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi ada 15 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan kota Tegal.

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah ada 8 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM rendah adalah 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM tinggi ada 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak.

Kabupaten Temanggung sendiri berada dalam kuadran III yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi dan IPM yang rendah. Tentu bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, terutama para *stakeholder*, posisi ini sangat mengkhawatirkan.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dalam peningkatan produktivitas dan kreativitas penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber daya alam (Brata, 2004). Sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia adalah melalui mutu modal manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mempengaruhi kualitas modal manusia baik secara mikro maupun makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah. Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin tinggi pendidikan



seseorang, semakin tinggi produktivitasnya dan hasil akhirnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

Selanjutnya untuk mengetahui pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dapat dilakukan dengan korelasi *rank spearman*. Formula korelasi *rank spearman* adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left( \frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

Dimana :

$r_s$  = koefisien korelasi *rank spearman*

D = perbedaan antara pasangan jenjang

N = jumlah sampel

Bila koefisien korelasi  $r_s$  bernilai nol, maka tidak ada korelasi dan bila  $r_s$  bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

**Tabel 3.1.**  
**Korelasi Rank Spearman IPM dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019**

Correlations			r	ipm
Spearman's rho	r	Correlation Coefficient	1.000	.357*
		Sig. (2-tailed)	.	.035
		N	35	35
ipm	ipm	Correlation Coefficient	.357*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.035	.
		N	35	35

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,357 dengan dengan tingkat signifikansi dibawah 5 persen. Secara statistik dapat dikatakan

bahwa ada korelasi searah antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM meskipun tidak cukup erat.

Masih rendahnya kontribusi kualitas pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Interpretasi yang paling utama adalah jika suatu daerah ingin membangun perekonomian, maka kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan, demikian juga sebaliknya jika ingin mengembangkan sumber daya manusia, maka kinerja perekonomian tidak bisa diabaikan. Cara yang paling efektif untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik diikuti pemerataan pendapatan (UNDP, 1999).

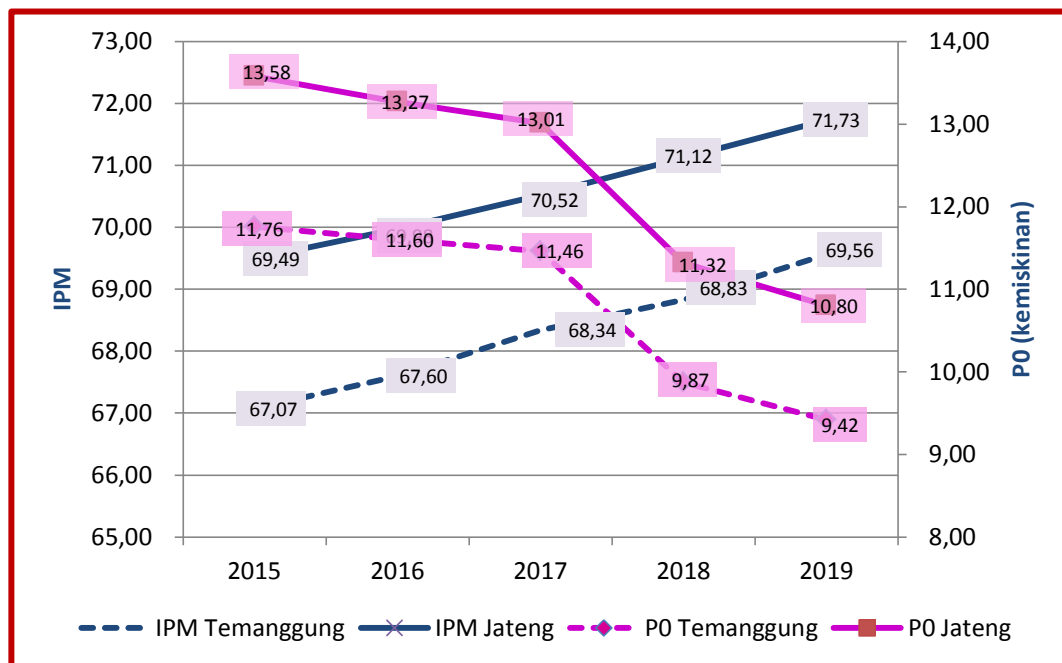
### **3.7. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Kemiskinan**

Bergesernya paradigma pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pertumbuhan melalui pemerataan merupakan langkah bijak yang memihak kepada kepentingan masyarakat miskin dan lemah agar masyarakat miskin tersebut memiliki peluang untuk berusaha secara produktif dan pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mubyarto, 2000).

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran rumah tangga itu sendiri ditentukan oleh pendapatan rumah tangga. Bagi penduduk miskin, sebagian besar bahkan seluruh

pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makan sehingga penduduk miskin tidak atau hanya sedikit memiliki kesempatan mendapat pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan selain diindikasikan dengan peningkatan IPM, juga diindikasikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

**Gambar 3.16.**  
**Perkembangan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

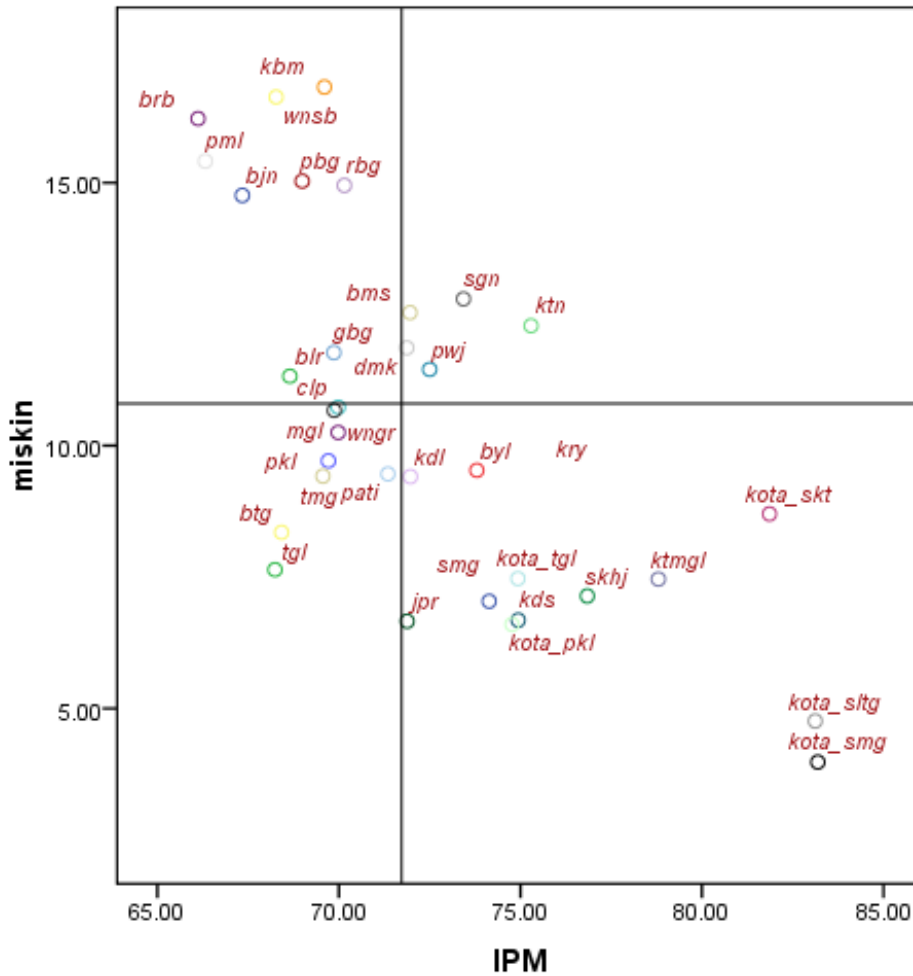


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari meningkatnya IPM yang diiringi dengan menurunnya kemiskinan sepanjang tahun 2015 – 2019. Jika IPM Kabupaten Temanggung masih jauh dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah,

persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung justru jauh lebih rendah dibandingkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

**Gambar 3.17.**  
**Tipologi Daerah Menurut IPM dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Meskipun tren pembangunan manusia selalu meningkat dan persentase penduduk miskin memiliki tren menurun, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia dan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilakukan analisis tipologi dengan mengadopsi tipologi klassen,

maka dapat terlihat bagaimana pola kemiskinan dan IPM antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat 5 kabupaten/kota memiliki IPM tinggi namun kemiskinan tinggi juga, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Demak. Kabupaten/kota ini berhasil mencapai pembangunan manusia yang cukup baik namun pembangunan tersebut belum berhasil menurunkan kemiskinan di daerahnya. Salah satunya disebabkan karena kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebaliknya terdapat 13 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pembangunan manusia tinggi sekaligus mampu mengurangi kemiskinan yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Kabupaten Temanggung termasuk dalam kuadran III yaitu kabupaten dengan kemiskinan yang sudah rendah namun pembangunan manusia masih rendah juga bersama Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Tegal. Sembilan Kabupaten lainnya merupakan kabupaten dengan kategori kemiskinan tinggi dan pembangunan manusia juga masih tertinggal.

Pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu paket prioritas pembangunan yang diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan tentu akan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatkan daya beli masyarakat, peningkatan derajat pendidikan maupun peningkatan akses ke pelayanan

kesehatan dasar. Secara kuantitatif, erat tidaknya hubungan antara kemiskinan dengan IPM dapat diuji dengan statistik korelasi *rank spearman*.

**Tabel 3.2.**  
**Korelasi Rank Spearman IPM dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019**

Correlations			IPM	miskin
Spearman's rho	IPM	Correlation Coefficient	1.000	-.622**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	35	35
	miskin	Correlation Coefficient	-.622**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan kemiskinan adalah sebesar 0.622 dengan tingkat signifikansi cukup tinggi. Secara statistik dapat dikatakan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan IPM berbeda arah dan cukup erat. Oleh karenanya kebijakan pembangunan yang paling efektif adalah kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi dengan pengurangan kemiskinan.

## BAB IV

### GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan, (Puspitawati, 2013). Dapat diartikan bahwa pembangunan semestinya menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Namun demikian upaya integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

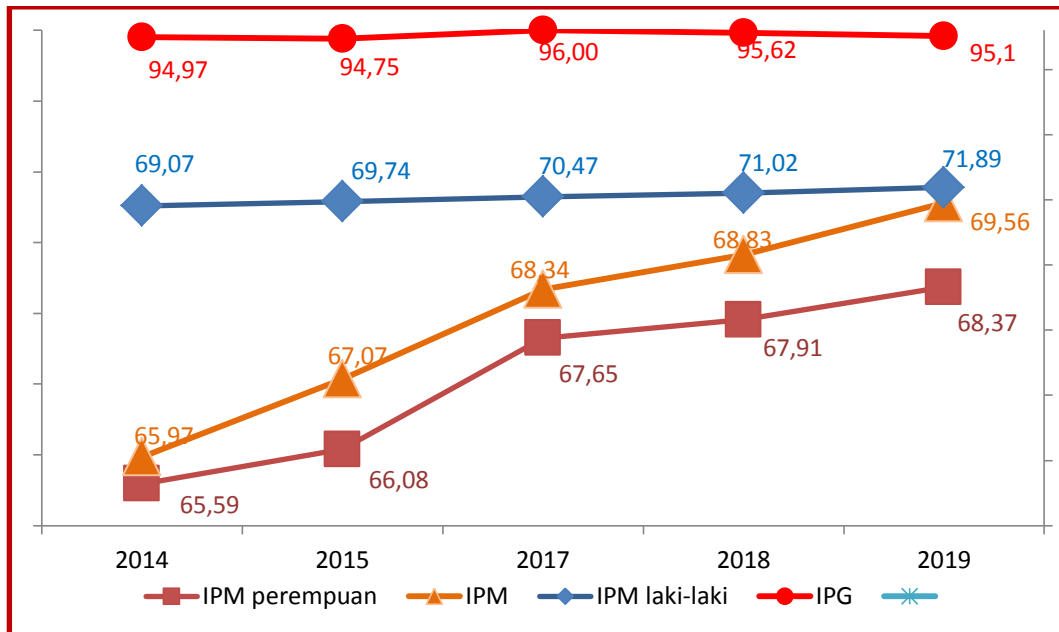
Berakhirnya pelaksanaan MDGs pada tahun 2015 merupakan awal dibentuknya sebuah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Isu gender kini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Sejarah pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak UNDP (*United Nations Development Program*) mengeluarkan laporan berkalanya HDR (*Human Development Report*) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDI, maka faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, terlahirlah IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Sedangkan perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi.

Untuk mengetahui ketimpangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di masing-masing provinsi, dapat dilihat dari besaran selisih nilai IPM dan nilai IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG menunjukkan semakin kecil perbedaan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin besar jarak (gap) capaian pembangunan perempuan dari capaian pembangunan laki-laki. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh kesetaraan gender di suatu wilayah.



**Gambar 4.1.**  
**Perkembangan IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, IPM dan IPG**  
**Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019**



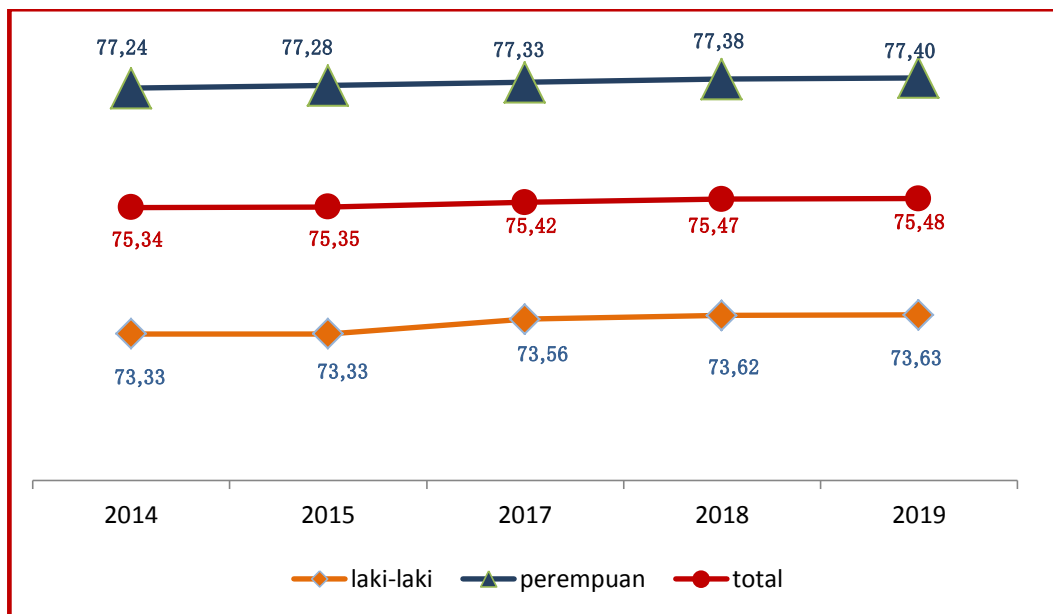
Gambar di atas menunjukkan capaian pembangunan manusia Kabupaten Temanggung dipilah menurut jenis kelamin serta nilai IPG. Dapat dilihat bahwa hingga tahun 2019 capaian pembangunan manusia perempuan masih cukup jauh dibanding capaian pembangunan manusia laki-laki, sebagaimana ditunjukkan dengan nilai IPG dibawah 100, yaitu baru mencapai 95,10.

Sejak tahun 2017, IPG Kabupaten Temanggung memiliki kecenderungan yang semakin turun. Pada tahun 2017, nilai IPG Kabupaten Temanggung mencapai 96,00, kemudian turun menjadi 95,62 pada tahun 2018 dan terus turun menjadi 95,10 pada tahun 2019. Penurunan IPG ini disebabkan karena capaian IPM perempuan lebih lambat dibanding capaian IPM laki-laki sehingga kesenjangan pembangunan laki-laki dan pembangunan perempuan menjadi lebih lebar.

#### 4.1. Umur Perempuan Lebih Panjang Dibanding Laki-Laki

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan hormon perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun berbeda kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

**Gambar 4.2.**  
**Perkembangan Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019**



Selama periode tahun 2014-2019, harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan.

Gambar diatas menunjukkan tren AHH perempuan di Kabupaten Temanggung selalu di atas AHH laki-laki. Pada tahun 2019 UHH perempuan sebesar 77,40 tahun, hampir 4 tahun lebih lama dibanding AHH laki-laki yang berada di tingkat 73,63 tahun. Capaian ini menjadi salah satu hal yang berkontribusi positif terhadap IPG tahun 2019.

Hal ini dapat berkaitan dengan perbedaan kepedulian terhadap kesehatan antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian Stefan Ek (2015) mengungkap bahwa perempuan menaruh perhatian dan rasa keingintahuan yang lebih besar dibanding laki-laki mengenai kesehatan serta lebih memperhatikan barang barang yang mereka beli yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

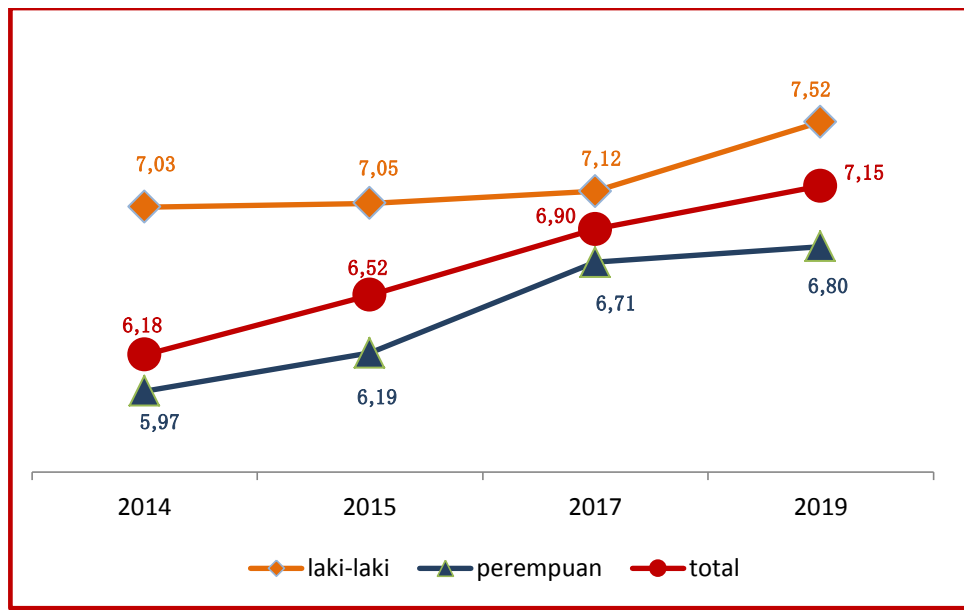
#### **4.2. Capaian Pendidikan Antargender Sudah Cukup Baik**

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai pendidikan ini tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan capaian dalam hal pendidikan penduduk dengan umur 25 tahun ke atas yang diasumsikan telah menyelesaikan fase bersekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Temanggung baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2019, terjadi perbedaan hampir 1 tahun capaian indikator ini antargender. Secara rata-rata laki-laki sudah mampu mengenyam pendidikan

selama 7,52 tahun atau hingga kelas 8 sekolah menengah sedangkan perempuan berada satu tahun di bawahnya sebesar 6,80 tahun.

**Gambar 4.3.**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019**

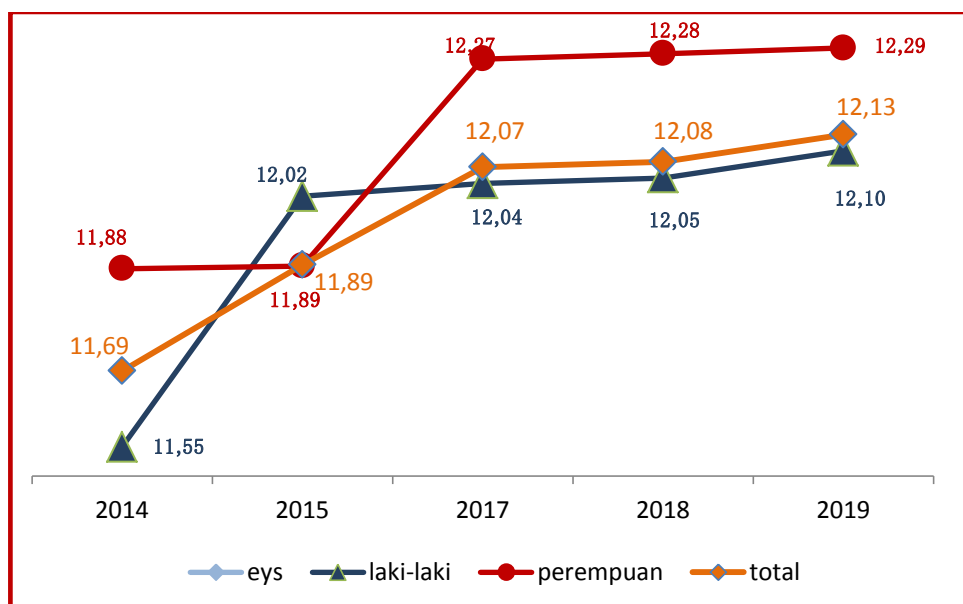


Dalam periode tahun 2015-2019, tren menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan selalu berada di bawah capaian laki-laki. Jika dilihat dari grafik pertumbuhannya, dapat dilihat bahwa RLS perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan RLS antargender menurun dari waktu ke waktu sehingga memberikan dukungan positif terhadap nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Kemajuan pendidikan bagi kaum perempuan juga terlihat dari indikator harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas. Berdasarkan indikator ini dapat dilihat bahwa pembangunan pendidikan bagi kaum perempuan sudah cukup setara dengan kaum laki-laki.

Secara umum, angka harapan lama sekolah perempuan di Temanggung justru sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada tahun 2019, angka harapan lama sekolah perempuan mencapai 12,29 tahun sedangkan laki laki mencapai 12,10 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang, baik laki-laki maupun perempuan adalah selama 12 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan minimal sampai dengan lulus SLTA.

**Gambar 4.4.**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019**

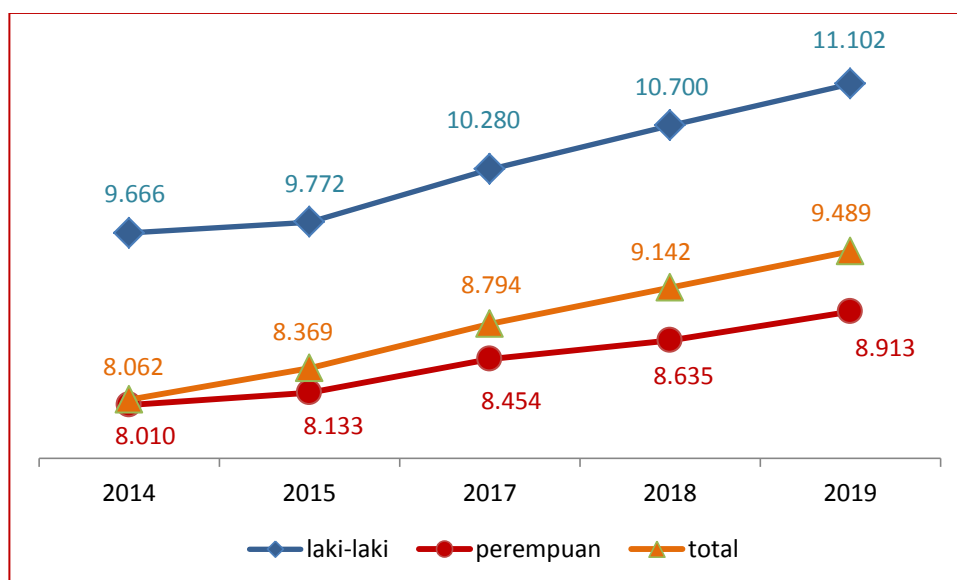


### 4.3. Kesenjangan Ekonomi Antar Gender

Salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan adalah faktor ekonomi. Seringkali keberhasilan pembangunan dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan gender. Selain tercantum dalam tujuan pembangunan

berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kelima tentang kesetaraan gender, isu ekonomi juga menjadi fokus pada tujuan kesepuluh yakni “mengurangi kesenjangan”, termasuk di dalamnya kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi, UNDP menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita, namun karena keterbatasan data yang dimiliki, indikator tersebut diproksi menggunakan pengeluaran perkapita.

**Gambar 4.5.**  
**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2019**



Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pengeluaran perkapita yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2019, secara rata-rata pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp. 8,913 juta pertahun. Angka ini jauh di bawah pengeluaran perkapita laki-laki yang mencapai Rp. 11,102 juta per tahun. Rata-rata pengeluaran per kapita laki – laki hampir 25

persen lebih tinggi dibanding pengeluaran per kapita perempuan. Perbedaan yang cukup tinggi pada pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan selama ini tentunya berkaitan langsung dengan perbedaan pendapatan yang diterima. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2018), perbedaan tersebut bisa disebabkan antara lain kecilnya *share* tenaga kerja perempuan di sektor yang produktivitasnya tinggi, diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja serta kurangnya pendidikan dan kompetensi yang dimiliki perempuan berkontribusi terhadap masalah ini. Oleh karenanya diperlukan usaha serta kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. IPM merupakan indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara multidimensi. Karena IPM disusun berdasarkan konsep UN, maka IPM dapat diperbandingkan baik antar daerah maupun antar waktu. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Temanggung mencapai 69,56, meningkat dibanding tahun 2018 (68,83) dan tetap pada peringkat ke 27 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. IPM Kabupaten Temanggung didukung kuat oleh pembangunan dalam dimensi kesehatan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2019, angka harapan hidup di Kabupaten Temanggung sudah cukup tinggi yaitu 75, 48 tahun dan berada pada peringkat ke 15 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu.
3. Sebaliknya pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2019 masih cukup tertinggal dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah yang masih jauh tertinggal yaitu masing masing sebesar 12,13 tahun (peringkat ke 28) dan 7,15 tahun (pada peringkat 22). Dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hanya sampai kelas 1 SLTP.



4. Pembangunan dimensi ekonomi yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita juga masih rendah. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Temanggung baru mencapai Rp 9.489.000 per kapita per tahun, jauh di bawah pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 11.102.000,00 dan berada dalam peringkat ke 31.
5. Angka IPG Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 baru mencapai 95.10, artinya masih ada gap yang cukup lebar antara pembangunan laki-laki dan perempuan. Pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan tidak menunjukkan bias gender namun dalam bidang ekonomi terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan antar gender. Pengeluaran per kapita penduduk laki – laki sudah mencapai Rp 11.102.000,00 sedangkan penduduk perempuan hanya Rp 8.913.000,00.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. *Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Djoko.2008. *AKSES PENDIDIKAN DASAR: Kajian dari Segi Transisi SD ke SMP*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No.2, 2008
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mubyarto.2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE
- Sukirno,Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta:Kencana
- Todaro dan Smith, 2000. *Pembangunan Ekonomi Jilid I* : Jakarta : Erlangga
- UNDP.1999. *Laporan Pembangunan Manusia*.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	67,77	68,60	68,90	69,56	69,98
Banyumas	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96
Purbalingga	67,03	67,48	67,72	68,41	68,99
Banjarnegara	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34
Kebumen	66,87	67,41	68,29	68,80	69,60
Purworejo	70,37	70,66	71,31	71,87	72,50
Wonosobo	65,70	66,19	66,89	67,81	68,27
Magelang	67,13	67,85	68,39	69,11	69,87
Boyolali	71,74	72,18	72,64	73,22	73,80
Klaten	73,81	73,97	74,25	74,79	75,29
Sukoharjo	74,53	75,06	75,56	76,07	76,84
Wonogiri	67,76	68,23	68,66	69,37	69,98
Karanganyar	74,26	74,90	75,22	75,54	75,89
Sragen	71,10	71,43	72,40	72,96	73,43
Grobogan	68,05	68,52	68,87	69,32	69,86
Blora	66,22	66,61	67,52	67,95	68,65
Rembang	68,18	68,60	68,95	69,46	70,15
Pati	68,51	69,03	70,12	70,71	71,35
Kudus	72,72	72,94	73,84	74,58	74,94
Jepara	70,02	70,25	70,79	71,38	71,88
Demak	69,75	70,10	70,41	71,26	71,87
Semarang	71,89	72,40	73,20	73,61	74,14
Temanggung	67,07	67,60	68,34	68,83	69,56
Kendal	69,57	70,11	70,62	71,28	71,97
Batang	65,46	66,38	67,35	67,86	68,42
Pekalongan	67,40	67,71	68,40	68,97	69,71
Pemalang	63,70	64,17	65,04	65,67	66,32
Tegal	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
Brebes	63,18	63,98	64,86	65,68	66,12
Kota Magelang	76,39	77,16	77,84	78,31	78,80
Kota Surakarta	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
Kota Salatiga	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12
Kota Semarang	80,23	81,19	82,01	82,72	83,19
Kota Pekalongan	72,69	73,32	73,77	74,24	74,77
Kota Tegal	72,96	73,55	73,95	74,44	74,93
JAWA TENGAH	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73

**Lampiran 2. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	Harapan Hidup				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	73,00	73,11	73,24	73,39	73,52
Banyumas	73,12	73,23	73,33	73,45	73,55
Purbalingga	72,81	72,86	72,91	72,98	73,02
Banjarnegara	73,59	73,69	73,79	73,91	74,01
Kebumen	72,77	72,87	72,98	73,11	73,22
Purworejo	74,03	74,14	74,26	74,40	74,52
Wonosobo	71,02	71,16	71,30	71,46	71,60
Magelang	73,27	73,33	73,39	73,47	73,56
Boyolali	75,63	75,67	75,72	75,79	75,83
Klaten	76,55	76,59	76,62	76,67	76,68
Sukoharjo	77,46	77,46	77,49	77,54	77,55
Wonogiri	75,86	75,88	76,00	76,05	76,07
Karanganyar	77,11	77,11	77,31	77,36	77,38
Sragen	75,41	75,43	75,55	75,60	75,62
Grobogan	74,27	74,37	74,46	74,55	74,61
Blora	73,85	73,88	73,99	74,12	74,23
Rembang	74,22	74,27	74,32	74,39	74,43
Pati	75,63	75,69	75,80	75,93	76,04
Kudus	76,41	76,43	76,44	76,47	76,50
Jepara	75,65	75,67	75,68	75,71	75,74
Demak	75,21	75,27	75,27	75,29	75,31
Semarang	75,52	75,54	75,57	75,62	75,63
Temanggung	75,35	75,39	75,42	75,47	75,48
Kendal	74,15	74,20	74,24	74,30	74,33
Batang	74,42	74,46	74,50	74,56	74,59
Pekalongan	73,35	73,41	73,46	73,53	73,57
Pemalang	72,77	72,87	72,98	73,11	73,22
Tegal	70,90	71,02	71,14	71,28	71,40
Brebes	68,20	68,41	68,61	68,84	69,04
Kota Magelang	76,58	76,62	76,66	76,72	76,75
Kota Surakarta	77,00	77,03	77,06	77,11	77,12
Kota Salatiga	76,83	76,87	76,98	77,11	77,22
Kota Semarang	77,20	77,21	77,21	77,23	77,25
Kota Pekalongan	74,11	74,15	74,19	74,25	74,28
Kota Tegal	74,12	74,18	74,23	74,30	74,34
JAWA TENGAH	73,96	74,02	74,08	74,18	74,23

**Lampiran 3. Angka Harapan Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	12,28	12,29	12,30	12,48	12,49
Banyumas	12,57	12,58	12,63	12,64	12,82
Purbalingga	11,78	11,93	11,94	11,95	11,98
Banjarnegara	11,39	11,40	11,41	11,42	11,45
Kebumen	12,49	12,61	12,90	12,91	13,04
Purworejo	13,04	13,05	13,47	13,48	13,49
Wonosobo	11,43	11,67	11,68	11,69	11,74
Magelang	12,14	12,15	12,47	12,48	12,53
Boyolali	12,13	12,14	12,15	12,16	12,43
Klaten	12,84	12,85	12,97	13,13	13,24
Sukoharjo	13,42	13,79	13,80	13,81	13,82
Wonogiri	12,42	12,43	12,44	12,45	12,48
Karanganyar	13,27	13,64	13,65	13,66	13,67
Sragen	12,21	12,30	12,64	12,65	12,69
Grobogan	12,25	12,26	12,27	12,28	12,29
Blora	11,91	11,92	12,13	12,14	12,19
Rembang	12,02	12,03	12,04	12,05	12,10
Pati	11,79	11,92	12,29	12,30	12,41
Kudus	13,14	13,19	13,20	13,21	13,22
Jepara	12,27	12,28	12,70	12,71	12,74
Demak	12,43	12,44	12,54	12,86	13,01
Semarang	12,82	12,83	12,84	12,85	12,94
Temanggung	11,89	12,06	12,07	12,08	<b>12,13</b>
Kendal	12,41	12,68	12,69	12,70	12,80
Batang	11,09	11,51	11,87	11,88	12,00
Pekalongan	12,00	12,15	12,16	12,17	12,40
Pemalang	11,86	11,87	11,88	11,91	11,94
Tegal	12,00	12,01	12,06	12,34	12,58
Brebes	11,34	11,37	11,69	12,02	12,03
Kota Magelang	13,10	13,55	13,79	13,80	13,81
Kota Surakarta	14,14	14,50	14,51	14,52	14,55
Kota Salatiga	14,97	14,98	14,99	15,00	15,34
Kota Semarang	14,33	14,70	15,20	15,50	15,51
Kota Pekalongan	12,59	12,77	12,78	12,79	12,83
Kota Tegal	12,46	12,88	12,89	12,90	13,04
JAWA TENGAH	12,38	12,29	12,57	12,63	12,68

**Lampiran 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014 – 2018**

Kabupaten/Kota	Rata – Rata Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	6,58	6,90	6,91	6,92	6,93
Banyumas	7,31	7,39	7,40	7,41	7,42
Purbalingga	6,85	6,86	6,87	7,00	7,14
Banjarnegara	6,17	6,26	6,27	6,28	6,5
Kebumen	7,04	7,05	7,29	7,34	7,53
Purworejo	7,65	7,66	7,69	7,70	7,91
Wonosobo	6,11	6,12	6,51	6,75	6,76
Magelang	7,19	7,40	7,41	7,57	7,77
Boyolali	7,10	7,17	7,44	7,55	7,56
Klaten	8,16	8,22	8,23	8,24	8,31
Sukoharjo	8,50	8,58	8,71	8,84	9,1
Wonogiri	6,39	6,57	6,68	6,88	7,04
Karanganyar	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52
Sragen	6,86	6,87	7,04	7,22	7,34
Grobogan	6,33	6,62	6,66	6,67	6,86
Blora	6,04	6,18	6,45	6,46	6,58
Rembang	6,92	6,93	6,94	6,95	7,15
Pati	6,71	6,83	7,08	7,18	7,19
Kudus	7,84	7,85	8,31	8,62	8,63
Jepara	7,31	7,32	7,33	7,43	7,44
Demak	7,45	7,46	7,47	7,48	7,55
Semarang	7,33	7,48	7,87	7,88	8,01
Temanggung	6,52	6,55	6,90	6,94	<b>7,15</b>
Kendal	6,64	6,65	6,85	7,05	7,25
Batang	6,41	6,42	6,61	6,62	6,63
Pekalongan	6,55	6,56	6,73	6,74	6,88
Pemalang	6,04	6,05	6,31	6,32	6,41
Tegal	6,30	6,54	6,55	6,70	6,86
Brebes	5,88	6,17	6,18	6,19	6,2
Kota Magelang	10,28	10,29	10,30	10,31	10,33
Kota Surakarta	10,36	10,37	10,38	10,53	10,54
Kota Salatiga	9,81	9,82	10,15	10,40	10,41
Kota Semarang	10,20	10,49	10,50	10,51	10,52
Kota Pekalongan	8,28	8,29	8,56	8,57	8,71
Kota Tegal	8,27	8,28	8,29	8,30	8,31
JAWA TENGAH	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53

**Lampiran 5. Pengeluaran Perkapita Per Bulan (000) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 – 2019**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cilacap	9.351	9.677	9.896	10.274	10.639
Banyumas	10.104	10.554	10.713	11.240	11.703
Purbalingga	8.938	9.159	9.340	9.786	10.131
Banjarnegara	7.930	8.400	8.630	9.160	9.547
Kebumen	8.008	8.276	8.446	8.757	9.066
Purworejo	9.305	9.497	9.601	10.048	10.342
Wonosobo	9.736	9.877	9.969	10.503	10.871
Magelang	8.182	8.501	8.627	9.025	9.387
Boyolali	11.806	12.192	12.262	12.758	13.079
Klaten	11.178	11.227	11.369	11.738	12.074
Sukoharjo	10.416	10.452	10.765	11.100	11.557
Wonogiri	8.417	8.589	8.765	9.117	9.426
Karanganyar	10.486	10.722	10.933	11.223	11.569
Sragen	11.434	11.688	12.041	12.391	12.720
Grobogan	9.457	9.487	9.716	10.097	10.350
Blora	8.699	8.846	9.065	9.385	9.795
Rembang	9.122	9.453	9.736	10.191	10.551
Pati	9.380	9.548	9.813	10.190	10.660
Kudus	10.203	10.348	10.639	10.979	11.318
Jepara	9.504	9.695	9.745	10.169	10.609
Demak	9.118	9.377	9.544	10.001	10.344
Semarang	10.778	11.102	11.389	11.807	12.116
Temanggung	8.369	8.593	8.794	9.142	9.489
Kendal	10.419	10.631	10.863	11.257	11.597
Batang	8.244	8.568	8.805	9.203	9.573
Pekalongan	9.208	9.300	9.702	10.221	10.508
Pemalang	7.177	7.447	7.785	8.186	8.546
Tegal	8.367	8.709	9.136	9.433	9.798
Brebes	8.898	9.148	9.554	9.890	10.238
Kota Magelang	10.793	11.090	11.525	11.994	12.514
Kota Surakarta	13.604	13.900	13.986	14.528	15.049
Kota Salatiga	14.600	14.811	14.921	15.464	15.944
Kota Semarang	13.589	13.909	14.334	14.895	15.550
Kota Pekalongan	11.253	11.721	11.800	12.312	12.680
Kota Tegal	11.748	11.849	12.283	12.830	13.250
JAWA TENGAH	9.930	10.153	10.377	10.777	11.102